

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Keberadaan perbankan sangat penting dalam perekonomian modern saat ini (Pare et al., 2017). Perbankan merupakan salah satu tonggak perekonomian di Indonesia, dikarenakan bank memiliki peran penting dalam usaha penyaluran dana untuk berbagai kepentingan yang secara langsung berhubungan dengan berbagai komunitas lingkungan masyarakat (Pratiwi et al., 2020). Dalam perjalanannya, perkembangan perbankan tidak terlepas dari perkembangan perdagangan. Seiring dengan perkembangan perdagangan dunia, maka perkembangan perbankan pun mulai semakin pesat (Nurdiana & Basar, 2020). Pada dasarnya tujuan utama yang ingin dicapai oleh semua perusahaan adalah bagaimana perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan seringkali mengabaikan dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari aktivitas atau tindakan ekonomi perusahaan (Ratnasari, 2011).

Seharusnya fenomena dilirikinya saham-saham perusahaan oleh para investor meningkatkan kualitas informasi pelaksanaan tanggung jawab sosial lingkungan dengan memperluas pengungkapan *corporate social responsibility*-nya (Yulianto & Nugroho, 2015). *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan aktivitas tanggung jawab perusahaan terhadap para *stakeholder* dengan cara memberi perhatian terhadap aspek sosial dan lingkungan, sejalan dengan teori *stakeholder* dimana perusahaan akan berupaya memuaskan

*stakeholder* yang memiliki andil mengendalikan sumber ekonomi yang penting bagi perusahaan, salah satunya yaitu investor yang memiliki power berupa kemampuan untuk membatasi pemakaian sumber ekonomi yang terbatas (Ghozali dan Chariri, 2007).

Beberapa tahun belakangan ini *corporate social responsibility* atau CSR memang sedang menjadi trend di Indonesia. Banyak orang berbicara tentang CSR serta perusahaan yang melakukan CSR semakin banyak (Tasya & Cheisviyanny, 2019). CSR berdampak bagi perkembangan perusahaan, salah satunya adalah meningkatkan citra perusahaan di mata publik. Akibatnya, perusahaan akan memperoleh respon positif setiap kali menawarkan produk kepada masyarakat. Dibuktikan oleh survei online yang dilakukan oleh Nielsen (2014) menunjukkan bahwa 55% konsumen lebih memilih membeli produk dan jasa dari perusahaan yang berkomitmen terhadap isu sosial dan lingkungan. Aktivitas perusahaan bukan hanya menentukan produk dan jasa apa saja yang akan beredar di pasar, namun juga memengaruhi kualitas udara yang kita hirup, air yang kita minum, dan bahkan kualitas sosial tempat kita hidup (Monks dan Minow 2011).

Tanggung jawab sosial di perusahaan perbankan memiliki kharisma dalam menunjang performa perusahaan (Roberts, 1992). Hal ini sangat penting bagi CSR untuk memastikan pelaporan tanggung jawab sosial yang berkelanjutan, pelaporan CSR merupakan hal yang penting dan membutuhkan peran akuntabilitas dan transparansi yang besar dari perusahaan karena, dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan terkait dengan investasi

sehingga dapat meningkatkan citra dan kualitas perusahaan (Tasya & Cheisviyanny, 2019). Jika perusahaan tidak mengungkapkan CSR investor akan enggan untuk memiliki saham di perusahaan tersebut, sehingga mengakibatkan harga saham suatu perusahaan jatuh yang dapat merugikan perusahaan, penelitian terkait dengan pengungkapan CSR telah dilakukan oleh Fatima dkk, (2015) menyimpulkan bahwa penyebab rendahnya kualitas pengungkapan dikarenakan belum adanya regulasi yang jelas mengatur pengungkapan CSR. Regulasi yang tidak jelas ini menyebabkan praktik CSR hanya sekedar untuk mematuhi aturan yang berlaku saja sehingga target dari aktivitas CSR sendiri tidak sesuai dengan harapan masyarakat atau para stakeholder (Tasya dan Cheisviyanny, 2019).

Berbagai aktivitas CSR diwadahi dalam suatu laporan. Laporan CSR didefinisikan sebagai pengungkapan informasi yang berkaitan dengan aktivitas, aspirasi, dan citra perusahaan yang berkaitan dengan lingkungan, pegawai, pelayanan konsumen, penggunaan energi, kesetaraan, bisnis yang wajar, tata kelola perusahaan, dan lain-lain (Gray et al. 2001). Alasan penting mengapa perusahaan antusias dalam menjalankan CSR yaitu pertama, perusahaan harus menyadari bahwa mereka beroperasi dalam suatu tatanan lingkungan masyarakat, kedua kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme dan ketiga kegiatan tanggung jawab sosial merupakan salah satu cara untuk meredam dan menghindari konflik sosial (Pare et al., 2017). Banyak manfaat yang diperoleh perbankan dengan melaksanakan *corporate social responsibility*, antara lain produk perbankan yang ditawarkan semakin diminati oleh masyarakat dan perusahaan disukai oleh investor, selain

itu CSR dapat digunakan sebagai alat marketing model baru bagi perusahaan bila itu dilaksanakan secara jangka panjang atau berkelanjutan (Pratiwi et al., 2020).

Hal tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan perbankan dalam menerapkan program CSR bersentuhan langsung dengan masyarakat sebagai bagian dari usaha perbankan. Namun pelaksanaan CSR tidaklah sebatas pendekatan kepada masyarakat sekitar (Santoso et al., 2017). Dengan melakukan kegiatan CSR maka dapat menjadikan sebuah perusahaan mendapat respon positif atas usahanya. Respon tersebut akan memberi dampak berupa citra dan nama baik perusahaan dikalangan masyarakat. Citra perusahaan merupakan salah satu bentuk penilaian masyarakat terhadap perusahaan tersebut. Jika citra perusahaan buruk yang dimunculkan di media maka akan menghambat kelancaran operasional dan menghambat upaya peningkatan produktivitas perusahaan, sehingga perusahaan sebagai pelaku bisnis tidak dapat menutup mata terhadap situasi dan kondisi di tempat perusahaan tersebut berada (Putranto & Kewal, 2010).

Sektor perbankan diharapkan tidak hanya melaksanakan tugas-tugas utama perbankannya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana saja melainkan juga diminta untuk tetap memiliki kepedulian terhadap lingkungan sebagai wujud CSR-nya. Pernyataan tersebut sesuai dengan fenomenal yang terjadi saat ini bahwa banyak perusahaan perbankan yang menyisihkan dananya untuk kegiatan CSR dibidang pendidikan, kesehatan dan pembangunan jembatan atau suatu gedung bahkan pemberian modal kepada kelompok masyarakat (Santoso et al., 2017). Dunia usaha saat ini mengalami perkembangan yang positif, dimana

perusahaan tidak hanya fokus untuk mencari laba semata, namun juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan sekitarnya (Widjaja dan Pratama, 2008) menyatakan bahwa jika sebuah perusahaan ingin mempertahankan kelangsungan hidupnya, maka perusahaan tersebut harus memperhatikan *triple bottom*, yaitu selain mengejar keuntungan (*profit*), perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*) (Yulianto & Nugroho, 2015). Meskipun telah terdapat beberapa aturan untuk melaksanakan program CSR dengan mencakup 3 bidang, realitanya banyak perusahaan yang mengesampingkan pelaporan CSR sehingga berakibat pada semakin banyaknya polusi, limbah dan pencemaran terhadap lingkungan yang ada termasuk pada produk yang dihasilkan. Pencemaran semacam ini harus diminimalisir oleh seluruh perusahaan yang beroperasi dalam pemanfaatan sumber daya melalui perbaikan pada pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan (Santoso et al., 2017).

Penelitian ini berfokus pada perusahaan perbankan. Hal ini dikarenakan perusahaan perbankan memiliki aktivitas bisnis yang sedikit berbeda dibandingkan perusahaan sektor lain, yaitu perusahaan perbankan memiliki dampak tidak langsung pada sosial dan lingkungan melalui proyek keuangan mereka, hal ini mendorong perusahaan perbankan dituntut harus ikut andil dalam melakukan kegiatan CSR (Putranto & Kewal, 2010). Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi *corporate social responsibility* diantaranya gender direksi (Septianingsih & Muslih, 2019), proporsi dewan komisaris independen (Asiah &

Muniruddin, 2018), kepemilikan publik (Kristi, 2012), dan kepemilikan institusional (Karima et al., 2005).

Faktor pertama yang mempengaruhi pengungkapan *corporate social responsibility* adalah Gender Direksi. Keragaman gender dalam anggota dewan menunjukkan hubungan yang terkait dengan kinerja sosial perusahaan (Shamsul dan Abdullah, 2016). Adanya perempuan dalam anggota dewan memberikan pengaruh yang positif pada upaya perusahaan melakukan donasi dalam kegiatan *corporate social responsibility* dan pada akhirnya bisa meningkatkan reputasi perusahaan (Yasser dkk, 2017). Peran perempuan dalam dewan direksi terhadap CSR dengan melakukan pengungkapan yang bersifat sukarela maka akan dapat meningkatkan hubungan perusahaan dengan pihak lain, diantaranya adalah investor, perbankan, konsumen, suplier dan pihak lain yang berkepentingan terhadap perusahaan (Farida, 2019). Kaitannya dengan teori ketergantungan sumber daya atau *resources dependence theory* yang menunjukkan keragaman memiliki potensi untuk meningkatkan informasi yang diberikan oleh dewan kepada manajer karena informasi unik yang dimiliki oleh beragam direktur. Diversitas sumberdaya (direksi) yang berkaitan dengan ras, suku, kebangsaan dianggap penting dapat memaksimalkan sumberdaya perusahaan (Siciliano, 1996). Menurut RDT, perempuan memiliki sumber daya manusia yang berbeda dengan laki-laki pada umumnya dan koneksi eksternal terhadap lingkungan yang berbeda, sehingga Carter dkk (2010) memperkirakan bahwa perempuan sebagai anggota dewan tidak akan memiliki efek yang sama seperti laki-laki sebagai anggota dewan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahindayani (2015), Yusiresita dkk (2016), Katmon dkk (2017), Hadya dan Susanto (2018) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh gender dewan direksi dan keberagaman gender dewan berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Tasya dan Cheisviyanny (2019), Indriyani dan Sudaryati (2020), menyatakan bahwa adanya pengaruh positif gender direksi terhadap pengungkapan CSR. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Rao dan Titl (2016), Ibrahim dan Hanefah (2016) bahwa jumlah dewan perempuan berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Dengan demikian semakin banyak wanita yang berada dalam jajaran dewan maka akan meningkatkan proses pengambilan keputusan, meningkatkan efektifitas hubungan dengan perusahaan lain, dan memiliki kecenderungan untuk melakukan partisipasi kegiatan CSR yang lebih baik (Anggraeni, 2020). Sebaliknya berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Zuang dkk (2018) menemukan Jumlah dewan perempuan berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan Anggraeni dan Djakman (2017), Septianingsih dan Muslih (2019) bahwa menemukan bahwa gender dewan direksi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Menurut Septianingsih dan Muslih (2019) gender direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* dapat diartikan dengan tanpa adanya keberadaan wanita dalam jajaran dewan, maka perusahaan tetap dapat berjalan dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Berdasarkan adanya gap penelitian tersebut,

maka penelitian tentang hubungan antara gender direksi dan pengungkapan CSR masih perlu di teliti kembali.

Faktor kedua yang mempengaruhi pengungkapan CSR adalah Proporsi Dewan Komisaris Independen. Dewan komisaris independen merupakan organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada dewan direksi (Hidayati, 2018). Dewan Komisaris Independen ini dianggap sebagai salah satu instrumen dalam memonitor integritas manajemen yang kedepannya dapat mendorong keluasan informasi pada tanggung jawab sosialnya (Pasaribu, et al (2015). Dewan komisaris sebagai perwakilan para pemilik saham berperan sebagai pengawas kinerja perusahaan, termasuk kinerja sosial perusahaan. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kepentingan seluruh pemangku kepentingan sebagaimana dinyatakan dalam teori stakeholder (Krisna dan Suhardianto, 2016). Fungsi pengawasan lebih maksimal jika jumlah dewan komisaris memadai sehingga meningkatkan tata kelola CSR dan kinerja sosial perusahaan (Indriyani dan Sudaryati, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim dan Hanefah (2016), Naseem (2017), Biswas dkk (2018), Villegas dkk (2018) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Dengan wewenang yang dimiliki, dewan komisaris dapat memberikan pengaruh yang cukup kuat untuk menekan manajemen agar mengungkapkan informasi CSR lebih banyak (Nurfrianto, 2014). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Qa' dan Suwaidan (2019), Faizah dan Novita (2020), Anggraeni (2020) menyatakan

bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR. Sebaliknya berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2018) dan Anggraeni (2020) menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Herizona & Yuliana, (2021) berpendapat bahwa dewan komisaris independen merupakan dewan perusahaan yang tidak terafiliasi, maka kegiatan operasi sehari-harinya tidak didorong oleh profitabilitas perusahaan. Berdasarkan adanya gap penelitian tersebut maka hubungan antara proporsi dewan komisaris independen dengan pengungkapan *corporate social responsibility* masih perlu diteliti kembali.

Faktor ketiga yang mempengaruhi pengungkapan *corporate social responsibility* adalah Kepemilikan Publik. Menurut Nur & Priantinah (2012) Kepemilikan publik adalah dimana segala aktivitas serta keadaan perusahaan yang harus dilaporkan dan diketahui oleh pihak publik sebagai salah satu bagian pemegang saham. Perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Publik, biasanya lebih sering menghadapi masalah asimetri informasi dikarenakan hambatan geografis dan bahasa. Menurut Soejoto (2017) kepemilikan publik yaitu kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak investor individual diluar manajemen yang tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan. Kepemilikan publik menggambarkan tingkat kepemilikan oleh perusahaan oleh masyarakat publik. Besarnya kepemilikan saham individual ini biasanya di bawah 5%, sehingga investor tidak memiliki kendali atas perusahaan. Oleh sebab itu, investor publik memerlukan perlindungan atas saham yang mereka tanam, perlindungan ini dapat berupa pengungkapan informasi

keuangan dan non-keuangan pada perusahaan tahunan yang berguna dalam pengambilan keputusan (Rivandi, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Fatkhiyatur (2016), Soejoto (2017), Arifur Khan et al. (2012), Ayu et al., (2013) dan Rahmayanty (2015) menemukan bahwa kepemilikan saham publik berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Perusahaan yang mempunyai tingkat kepemilikan publik lebih tinggi akan cenderung melakukan lebih banyak pengungkapan sosial karena dinilai memiliki tanggung jawab secara moral kepada masyarakat. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustia (2013) dan Ratmelia (2015) menemukan bahwa tidak adanya pengaruh antara kepemilikan saham publik terhadap pengungkapan CSR. Dikarenakan kepemilikan publik pada perusahaan yang ada di Indonesia secara umum masih belum memperdulikan permasalahan lingkungan dan sosial sebagai isu kritis yang harus secara ekstensif untuk diungkapkan dalam laporan tahunan. Berdasarkan gap penelitian tersebut maka hubungan antara kepemilikan publik dan pengungkapan *corporate social responsibility* masih perlu diteliti kembali (Ayu et al., 2013).

Faktor keempat yang mempengaruhi pengungkapan *corporate social responsibility* adalah Kepemilikan Institusional. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi (badan) (Karima et al., 2005). Jumlah kepemilikan saham oleh pihak-pihak yang berbentuk institusi, seperti bank, perusahaan investasi, dana pensiun, perusahaan asuransi, dan institusi lainnya. Pemegang saham institusional juga memiliki *opportunity, resources*, dan *expertise* untuk menganalisis kinerja dan tindakan manajemen. Investor

institusional sebagai pemilik sangat berkepentingan untuk membangun reputasi perusahaan (Rivandi, 2020). Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor kinerja manajemen sebagai pencegahan terhadap kecurangan yang dilakukan oleh manajemen karena keberadaan kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Semakin besar kepemilikan institusional maka akan mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial (Bangun dkk, 2012).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Soliman et al. (2012), Nugroho & Yulianto (2015) dan Sari et al. (2013) menemukan bahwa kepemilikan institusional mempunyai pengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Hal ini disebabkan besarnya kepemilikan institusional merupakan entitas perbankan, asuransi, dana pensiun, reksa dana, dan institusi lain yang mempunyai kecenderungan untuk berinvestasi dalam rangka mendapatkan keuntungan, sehingga tingkat kepemilikan institusional yang tinggi menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar untuk menghalangi perilaku oportunistis manajer tidak dapat berjalan optimal. Oportunistis manajer tidak dapat berjalan optimal. Berbeda dengan itu, Waryanto (2010) yang memperoleh hubungan negatif antara kepemilikan saham institusional dengan luas pengungkapan CSR. Artinya semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional, maka akan mengurangi tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan. Namun penelitian yang dilakukan oleh Rochayatun (2016) dan Husna (2017) menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Mereka mengemukakan bahwa kepemilikan institusional di

Indonesia belum menjadi pertimbangan yang serius dalam tanggung jawab sosial sebagai salah satu kriteria dalam melakukan investasi sehingga para investor institusi ini cenderung tidak menekan perusahaan untuk mengungkapkan CSR secara detail dalam laporan tahunan perusahaan. Berdasarkan gap penelitian tersebut maka hubungan antara kepemilikan institusional dengan pengungkapan *corporate social responsibility* masih perlu diteliti kembali (Rivandi, 2020).

Penelitian ini mengembangkan penelitian yang dilakukan oleh Nurdiana dan Basar (2020) yang meneliti mengenai Pengaruh Kepemilikan Publik Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Pengembangan yang dilakukan adalah dengan menambahkan variabel Gender Direksi (Septianingsih & Muslih, 2019), Proporsi Dewan Komisaris Independen (Asiah & Muniruddin, 2018), dan Kepemilikan Institusional (Karima et al., 2005). Selain itu Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada periode sampel yang digunakan. Periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 2017-2020. Sedangkan dalam penelitian Nurdiana dan Basar (2020) menggunakan periode tahun 2012-2016. Sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor perbankan karena perbankan merupakan yang menyediakan jasa pelayanan terhadap masyarakat dan menggunakan sumber daya publik yang besar yaitu tenaga kerja, sehingga perusahaan sektor perbankan akan mengedepankan hubungan baik dengan nasabah dan lebih bertanggung jawab terhadap produk-produk yang disediakan sebagai salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat (Rahayu dan Cahyani, 2014). Selain itu, hubungan langsung dengan tenaga kerja juga merupakan hal yang dipertimbangkan mengingat

pentingnya peran tenaga kerja untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan sektor perbankan. Alasan tersebut berkaitan erat dengan *corporate social disclosure* (Pudjianti dan Ghozali, 2021).

Berdasarkan uraian diatas peneliti ingin meneliti **“PENGARUH GENDER DIREKSI, PROPORSI DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN, KEPEMILIKAN PUBLIK DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY”** (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2020).

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah gender direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*?
2. Apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*?
3. Apakah kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*?
4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*?

#### **C. Pembatasan Masalah**

Pada penelitian ini, penulis menentukan batasan dari masalah yang ada dan telah terumuskan agar terarah dan terkonsentrasi dalam melakukan

penelitian. Pembatasan masalah tersebut dikarenakan *corporate social responsibility* dipengaruhi oleh banyak variabel sehingga dalam penelitian ini peneliti lebih fokus untuk membahas variabel gender direksi, proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan publik, dan kepemilikan institusional yang berdasar pada penelitian terdahulu menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut lebih mempengaruhi dalam penentuan *corporate social responsibility*. Objek dalam penelitian ini merupakan laporan keuangan tahunan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2020 yang memiliki gender direksi, proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan publik, kepemilikan institusional dalam pengungkapan *corporate social responsibility*.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh positif gender direksi terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* sektor perbankan periode 2017-2020.
- b. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh positif proporsi dewan komisaris independen terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* sektor perbankan periode 2017-2020.
- c. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh positif kepemilikan publik terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* sektor perbankan periode 2017-2020.

- d. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh positif kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* sektor perbankan periode 2017-2020.

## **E. Manfaat Penelitian**

### **a. Bagi Perusahaan**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk mengambil keputusan dan membuat kebijakan dalam bidang yang berhubungan dengan faktor yang mempengaruhi pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

### **b. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya tentang pengaruh gender direksi, proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan publik dan kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

### **c. Bagi Akademis**

Penelitian ini diharapkan menambah ilmu pengetahuan bagi akademis guna membantu akademis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan serta menjadi rujukan khususnya mengenai pengaruh gender direksi, proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan publik dan kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.